

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN BELANJA MODAL TERHADAP KINEJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Cahyat Rohyana, Rozan Abdul Rozaq
cahyatrohayana@poltekpos.ac.id, rozanabdulr7@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. Kinerja Keuangan merupakan indikator penilaian pencapaian suatu tujuan sebuah instansi. Kinerja Keuangan Pemerintah dapat dilihat menggunakan perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan, pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Menggunakan sumber data sekunder. Hipotesis yang ditetapkan menggunakan uji dua pihak (two tailed). Teknik analisis yang digunakan uji normalitas, korelasi product moment, analisis korelasi berganda, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, baik secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah*

ABSTRACT

Local Own Revenue is revenue obtained by the region which is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. Capital expenditures are expenditures whose benefits tend to exceed one fiscal year and will increase government assets or assets. Financial performance is an indicator of an assessment of the achievement of an agency's goals. Government Financial Performance can be seen using the calculation of the revenue growth ratio. The purpose of this study was to determine how the influence of Local Own Revenue on Financial Performance, the influence of Capital Expenditures on Government Financial Performance, and the influence of Local Own Income and Capital Expenditures on the Financial Performance of Bandung City Government. This research is a quantitative research. Using secondary data sources. The hypothesis is determined using a two-tailed test. The analysis technique used is the normality test, product moment correlation, multiple correlation analysis, multiple linear regression analysis, determination coefficient analysis, t test and F test. The results show that local revenue and capital expenditure do not have a significant effect on Government Financial Performance. partial or simultaneous.

Keywords: *Local Own Revenue, Capital Expenditure, Government Financial Performance*

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan Negara. Organisasi tersebut adalah suatu lembaga pemerintah yang bersifat nirlaba. Lembaga pemerintah pada setiap negara memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan pelayanan untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan pada masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat dengan penerapan kebijakan otonomi daerah. “Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri” (Sujarweni, 2015, hal. 231). “Pada hakekatnya pelaksanaan otonomi daerah yaitu memberikan peluang yang besar pada pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, baik yang menyangkut sumber daya manusia atau sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah . Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, “Pemerintah suatu daerah harus semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat baik dalam hal pembiayaan pembangunan atau dalam hal pengelolaan keuangan daerah”. Dipakainya aturan otonomi daerah mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah harus secara mandiri oleh pemerintah suatu daerah. Tujuannya agar proses pembangunan pada suatu daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Pengaruh kemajuan suatu daerah disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, serta efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

(Rondonuwu et al., 2015) menyatakan bahwa “kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat.” Menurut (Halim & Kusufi, 2016, hal. 31) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.”

Alat untuk mengukur atau menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal tatakelola keuangan daerahnya adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan alat analisis rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah memperlihatkan berapa besar kemampuan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan pendapatan daerahnya dari satu periode ke periode selanjutnya. Menurut (Kawatu, 2019, hal. 95) “Pertumbuhan pendapatan bermanfaat mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran, kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan meningkat, sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan.”

Dikutip dari (Katadata.co.id) pada tanggal 9 juli 2020 mengenai “Pendapatan Negara turun 9,8%. Berita tersebut mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (kemenkeu) mencatat realisasi defisit APBN hingga Juni 2020 mencapai Rp257,8 triliun, naik 90,7% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 135,1 triliun. Salah satu penyebabnya yaitu pendapatan negara yang turun 9,8%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pendapatan negara hanya mencapai Rp 899,6 triliun . “ini sesuai estimasi kami dimana pendapatan negara akan minus sekitar 10%, kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR.”

Adapun fenomena yang terjadi di beberapa daerah juga mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan daerah yang dikutip dari (fin.co.id) mengenai Pendapatan Daerah turun 15,81%. “Pendapatan daerah 530 daerah di Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar akibat pandemi COVID-19. Jumlahnya mencapai 15,81 persen. Sebelum ada Corona, pendapatan sebesar Rp1.238,51 triliun, Namun, saat ini hanya Rp1.042,69 triliun”. Ada selisih Rp195,82 triliun. “Jadi koreksi untuk pendapatan memang cukup dalam., Secara nasional pendapatan daerah turun 15,81 persen,” ujar Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Rabu (3/6). Dia menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan komponen penerimaan yang paling tertekan. Turunya hingga 27,73 persen. Hal ini diakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi. Sehingga berdampak langsung terhadap pajak dan retribusi daerah.

Ditinjau dari beberapa fenomena diatas menggambarkan tidak semua pemerintah daerah mapan dalam secara keuangannya, Negara dan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia mengalami

penurunan pertumbuhan pendapatan daerah hingga minus 10% dan turun 15% yang mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi yang berdampak juga pada pajak dan retribusi daerah. Hal ini menjelaskan adanya penurunan kinerja keuangan seperti yang diungkapkan oleh (Kawatu, 2019, hal. 95) bahwa “jika terjadi penurunan pertumbuhan pendapatan maka hal itu menunjukkan adanya penurunan kinerja keuangan. Apabila daerah tidak mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya maka kinerja keuangan pemerintah di anggap tidak baik dalam kinerja keuangannya dan pengelolaan keuangannya”.

Pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan menggali sumber-sumber keuangan daerah yang mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki pemerintah daerah, secara optimal akan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Dengan adanya otonomi daerah mengakibatkan pemerintah daerah yang seharusnya mampu menghasilkan pendapatan asli daerah supaya dapat meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004), “pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh langsung berdasarkan peraturan daerah yang berlaku”. “Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Belanja modal merupakan salah satu belanja di pemerintah daerah yang mampu menghasilkan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan pada suatu daerah. Menurut (Andirfa et al., 2016) “Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan”. Belanja modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Menurut (Puspitasari et al., 2015) “Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum merupakan kegiatan belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah”. Dengan berkembang pembangunan infrastruktur di beberapa daerah dapat meningkatkan kegiatan investasi di daerah tersebut. Sehingga dampak pertumbuhan pendapatan daerah pada masa ke masa dapat mendorong perekonomian daerah semakin berkembang dan meningkat serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang, maka Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	,284 ^a	,081	,025	100,19787	,081	1,445	2	33	,250

Bandung?. 2)

Bagaimana

Pengaruh

Pertumbuhan

Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung?. 3) Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif. Adapun definisi metode kuantitatif menurut (Sugiyono, 2017, hal. 8) yaitu “Metode penelitian yang berlandaskan filsafat *positive*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Metode sosiatif juga digunakan dalam penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2017, hal. 36) mendefinisikan bahwa “Asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling* yakni *purposive sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Periode penelitian yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 2) Jenis data yang digunakan adalah data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan realisasi pengeluaran Belanja Modal per bulan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 3) Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitiannya sebanyak 36 sampel. Metode pengumpulan data ini yang digunakan diperoleh dari Studi Kerpustakaan dan Studi Dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi *Product Moment*, Korelasi Berganda, Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis Koefisien Determinasi, Uji t dan Uji f.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Korelasi *Product Moment*

Tabel 1.
Korelasi *Product Moment*

		Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Kinerja Keuangan Pemerintah
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	,019	,246
	Sig. (2-tailed)		,913	,149
	N	36	36	36
Belanja Modal	Pearson Correlation	,019	1	-,138
	Sig. (2-tailed)	,913		,424
	N	36	36	36
Kinerja Keuangan Pemerintah	Pearson Correlation	,246	-,138	1
	Sig. (2-tailed)	,149	,424	
	N	36	36	36

Berdasarkan hasil pengolahan data korelasi *product moment* menggunakan SPSS dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah adalah 0,246. Angka korelasi menunjukkan bahwa korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) ada dalam kategori “Rendah/Lemah” sesuai dengan interval dengan nilai 0,20-0,399. Untuk variabel Belanja Modal (X2) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) korelasi ini menunjukkan angka 0,139. Dengan angka tersebut korelasi antara Belanja Modal (X2) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) berada dalam kategori “Sangat Rendah/Sangat Lemah” sesuai dengan interval dengan nilai antara 0,00 - 0,200.

2. Uji Korelasi Berganda

Tabel 2.
Korelasi Ganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,632	17,537		1,291	,206
	Pendapatan Asli Daerah	,552	,371	,248	1,487	,147
	Belanja Modal	-,012	,014	-,142	-,852	,400

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka R sebesar 0,284, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang “Rendah/Lemah” antara Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah (Y). Hal ini terbukti dengan interval nilai antara 0,20 – 0,399, yang artinya tingkat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah Rendah/Lemah .

3. Analisis Linear Berganda

Dari nilai-nilai koefisien, persamaan regresi yang dapat disusun untuk variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal adalah:

$$Y = 22,632 + 0,552X_1 - 0,012X_2$$

Dari persamaan diatas, dapat diartikan sebagai berikut: Jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Belanja Modal (X_2) nilainya adalah 0, maka nilai variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) adalah sebesar konstanta atau sebesar 22,632. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,552 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 1, maka Kinerja Keuangan Pemerintah modalakan mengalami kenaikan sebesar 0,552. Karena koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif pula antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y). Jadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (X_1) mengakibatkan kenaikan pada Kinerja Keuangan Pemerintah (Y). Koefisien regresi variabel Belanja Modal (X_2) sebesar -0,012, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Belanja Modal mengalami kenaikan 1, maka Kinerja Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar -0,012. Karena koefisien bernilai negatif maka terjadi hubungan negatif pula antara Belanja Modal (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y), jadi kenaikan Belanja Modal (X_2) mengakibatkan penurunan pada Kinerja Keuangan Pemerintah (Y).

4. Koefisien Determinasi

Tabel 4.
Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,284 ^a	,081	,025	100,19787

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah sebesar 8,1% dan sisanya 92,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki kontribusi positif terhadap Kinerja Keuangan sebesar 8,1%.

5. Uji t

Tabel 5.
Uji t Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,632	17,537		1,291	,206
	Pendapatan Asli Daerah	,552	,371	,248	1,487	,147
	Belanja Modal	-,012	,014	-,142	-,852	,400

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Hasil uji t dengan menggunakan SPSS Statistic 25.00 dalam tabel diatas antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan yang dapat dilihat dari kolom t dalam tabel *coefficient* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,487. Dengan melihat pada t_{tabel} jumlah data $n = 36$ dan $(df) = n-k-1$ atau $36-3 = 33$ pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dengan pengujian dua pihak maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,034. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengolahan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,147 $> 0,05$, maka dapat diartikan H_0 dalam penelitian ini diterima dan H_a ditolak. Artinya, Tidak terdapat pengaruh antara Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Belanja Modal menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar -0,852. Dengan melihat pada t_{tabel} jumlah data $n = 36$ dan $(df) = n-k-1$ atau $36-3 = 33$ pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dengan pengujian dua pihak maka diperoleh t_{tabel} sebesar -2,034. Ini menunjukkan bahwa hasil pengolahan $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Nilai signifikansi Belanja Modal adalah sebesar 0,400 $> 0,05$, maka dapat diartikan H_a dalam penelitian ini di tolak dan H_0 diterima. Artinya, Tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

6. Uji f

Tabel 6.
Uji f Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29014,971	2	14507,486	1,445	,250 ^b
	Residual	331307,251	33	10039,614		
	Total	360322,222	35			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil derajat kebebasan (df) dapat dilihat dalam F_{hitung} sebesar 1,445, sehingga dapat ditentukan bahwa nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{tabel} ($1,445 < 3,28$) dengan nilai signifikansi kedua variabel adalah $0,250 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal secara bersama-sama (simultan) Tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode 2017-2019 dengan menggunakan laporan keuangan per bulan.

Pembahasan

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis uji t Pendapatan Asli Daerah mempunyai t_{hitung} sebesar 1,487 dan t_{tabel} sebesar 2,034 yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan angka signifikansi adalah 0,147 yang berada diatas 0,05. Artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Maka kesimpulannya adalah hipotesis H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak. Secara teori Menurut (Samudra, 2015, hal. 54) "Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya." Dari hasil analisis tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andirfa et al., 2016) menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Artinya setiap perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah, maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga bermakna bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum optimal sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan dan sepenuhnya belum mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan pendapatan daerah.

2) Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Bandung

Berdasarkan hasil analisis uji t secara parsial Belanja Modal mempunyai t_{hitung} sebesar -0,852 dan t_{tabel} sebesar -2,034 yang berarti $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan angka signifikansi adalah 0,400 yang berada diatas 0,05. Artinya Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Maka kesimpulannya adalah hipotesis H_{o2} diterima dan H_{a2} ditolak. Secara teori menurut (Erlina et al., 2015, hal. 155). "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset

tak berwujud.” Dari hasil analisis tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan (Antari & Sedana, 2018) bahwa “Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.” Berdasarkan pernyataan tersebut bermakna bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi karna kegiatan belanja modal hanya dapat menghasilkan sumber-sumber keuangan dibeberapa tahun kemudian untuk pertumbuhan pendapatan daerah.

3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil Uji F dapat dilihat F_{hitung} sebesar 1,445, sehingga dapat ditentukan bahwa F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($1,445 < 3,28$) dengan nilai signifikansi kedua variabel adalah $0,250 < 0,05$, maka kesimpulannya adalah H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal tersebut H_{O3} yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah diterima. Secara perhitungan statistik dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini tidak ada pembanding dengan penelitian terdahulu karna Hasil Penelitian yang sejalan dengan Penelitian ini masih sedikit dan jarang dilakukan untuk pengujian secara simultan karena menggunakan rasio pertumbuhan. Namun secara parsial penelitian ini telah sejalan dengan penelitian (Andirfa et al., 2016) yang mengakatan bahwa ”Setiap perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah, maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.” Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Antari & Sedana, 2018) bahwa ”Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.” Hal ini juga bermakna bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum optimal sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kegiatan belanja modal hanya dapat menghasilkan sumber - sumber keuangan dibeberapa tahun kemudian untuk pertumbuhan pendapatan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian beserta identifikasi masalah yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) dan Belanja Modal (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil hipotesis antara variabel X_1 dan Y menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Hasil hipotesis secara parsial antara variabel X_2 dan Y menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. artinya Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Hasil hipotesis secara simultan antara X_1 dan X_2 dengan Y menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan manfaat bagi penulis selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian diharapkan dapat menambahkan sampel atau mengganti sampel agar dapat memperluas penelitian dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, diharapkan mengganti atau menambahkan variabel independen lain seperti Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Belanja Operasi sehingga peneliti selanjutnya memungkinkan untuk menemukan hal yang baru dan berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Basri, H., Com, M., Shabri, M., Majid, A., & Ec, M. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan*. 30–38.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Erlina, Rambe, S., & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akural*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Toeri, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Penerbit Buku Pendidikan

Deepublish.

Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Puspitasari, N. L. P. L., Adiputra, M. P., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). *PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng) Ni Luh Putu Lindri Puspitasari Jurusan Akuntansi Program SI Universitas Pendidikan Ganesha*. 3(1).

Rondonuwu, R. H., Tinangon, J., & Budiarmo, N. (2015). *Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten minahasa*. 3(4), 23–32.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.

Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Pustaka Baru Press.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah